

Laporan Indeks Inovasi Daerah

Nama SKPD / Kelompok : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Nama Inovasi : E-BAPAK TANI (Bank Data Penyaluran Bantuan Ke Kelompok Tani Berbasis Elektronik)
Tahapan Inovasi : Penerapan
Inisiator Inovasi Daerah : HEFFY ANDRYANI AR, SP
Bentuk Inovasi : Tata Kelola
Jenis Inovasi : Belum ditentukan
Inovasi Dimulai : 14 January 2021
Apakah Ada Kajian? : Belum ditentukan
Judul Kajian :
Urusan :
Tagging Indikator Strategis :
Asta Cita :
Koordinat : ,
Diikutkan Lomba : Tidak

Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan:

Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Bidang Tanaman Pangan banyak mendapatkan alokasi bantuan pemerintah untuk disalurkan ke kelompok tani, baik bersumber dana APBN, APBD 1 maupun APBD 2, yang meliputi bantuan untuk komoditas Padi, Jagung, Kedelai, kacang tanah dan saprodi lainnya. Bentuk bantuan yang dialokasikan berbeda-beda, ada yang berupa barang maupun berupa transfer dana langsung ke kelompok tani untuk dibelanjakan sesuai ketentuan. Selama ini banyak bantuan yang di salurkan kepada kelompok tani sebagai penerima yang ada di Kabupaten Balangan tidak terekapitulasi secara jelas. Sehingga data-data nya tidak terkumpul secara lengkap. Selain itu salah satu tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan yang sudah disalurkan kepada kelompok tani di lapangan yang akan disajikan dalam bentuk data. Data-data kelompok tani penerima bantuan sangat diperlukan karena sebagai bahan dasar untuk penyaluran bantuan berikutnya dan bantuan lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 4 Ayat (3) Menyatakan Bahwa Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dan ayat (4) Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit : a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b). Tidak Wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c). memenuhi persyaratan penerima hibah. Oleh karena itu bantuan yang akan disalurkan harus tepat dan tidak salah sasaran yaitu bantuan yang akan diterima oleh kelompok tani setiap 2 tahun sekali. Tidak boleh terus menerus setiap tahun dan bahkan setiap tahun ada beberapa alokasi bantuan yang diterima oleh kelompok yang sama, dan juga kelompok tani sebagai calon penerima bantuan dapat diidentifikasi secara cepat sehingga memperlancar pemberian bantuan ke kelompok tani. Dengan tujuan kemandirian kelompok tani dan pemerataan pemberian bantuan (asas keadilan)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan bergabung menjadi 1 SKPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. Sehingga ada 3 (tiga) Urusan yang harus ditangani yaitu urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan.

Tujuan Inovasi:

1. Sulitnya identifikasi kelompok tani yang sudah dan yang belum menerima bantuan di tahun berjalan yang bisa mengakibatkan terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan ke kelompok tani.
2. Adanya kelompok tani yang tidak pernah menerima bantuan dan Sulitnya merekapitulasi data-data yang dibuat dengan secara manual.
3. Data-data yang akan dimasukan dalam Aplikasi e-Bapak Tani Meliputi: Nama Kelompok Tani, Nama Ketua, NIK Ketua, Luasan, Bantuan yang diterima, Tahun penerimaan Bantuan, Data tanam dan Data Panen, Data Produksi dan Produktivitas.
4. Harus ada 6 Bidang yang saling bekerjasama dalam penyaluran Bantuan ke kelompok Tani, sehingga bantuan tepat sasaran.

Manfaat Inovasi:

Bahwa untuk mewujudkan Sasaran Strategis SKPD yaitu peningkatan Produksi baik Pertanian maupun Perikanan, maka diperlukan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Selanjutnya untuk memudahkan kegiatan penyaluran bantuan ke Kelompok Tani baik dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Peternakan, Bidang P5 dan

Bidang Perikanan ” akan dicapai jika Optimalnya Pengelolaan data penyaluran bantuan ke kelompok tani. Metode yang digunakan untuk Pengelolaan data penyaluran bantuan sarana produksi ke Kelompok Tani agar lebih optimal maka diperlukan Aplikasi untuk Pengelolaan Data Penyaluran Bantuan” yang dilakukan dengan cara “Membuat Aplikasi untuk melaksanakan Penyaluran Bantuan ke kelompok Tani” atau “Membuat Aplikasi online petugas dilapangan untuk pengusulan bantuan”.

Hasil Inovasi:

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Organisasi) :

- Meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan
- Mempermudah pelayanan permintaan Laporan dan data dari pihak lain terutama Bappeda untuk kegiatan Perencanaan dan Penganggaran
- Dapat menyajikan laporan Bantuan Pemerintah dana APBN, APBD 1 dan APBD 2 secara mudah.
- Mempermudah untuk melakukan pengecekan kelompok tani yang mendapat bantuan serta sumber dananya.

2. Bagi Pemerintah Daerah :

- Proses pelaporan lebih mudah karena data diinput dan disajikan dalam bentuk aplikasi
- Mempercepat pelayanan kepada Pihak Lain yang memerlukan data laporan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Bantuan yang disalurkan akan tepat guna dan tepat sasaran.

Isian Indikator:				
No.	Indikator	Keterangan	Parameter	Bukti Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Ada
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	11-30 SDM	Ada
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project), perekayasa, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Ada
4	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan peroleh data/informasi dan lain-lain	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem	Ada
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (Bimtek, Training dan TOT)	Ada
6	Program Dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Ada
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Ada
8	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan surat penugasan atau surat perintah kepala SKPD atau yang setara	Ada
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau Lebih	Ada

10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Media Berita	Ada
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutoria	Ada
12	Kemudahan informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan Informasi layanan melalui metode sebagai berikut: 1. Manual, seperti : tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti : layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti : instagram/facebook/whatsapp. dsb 4. Layanan Online, melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)	Informasi Layanan Diperoleh Melalui 3 atau Lebih Metode	Ada
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Ada
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir	>= 91%	Ada
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan	Ada dukungan melalu informasi digital dalam satu portal unit organisasi bersangkutan (Digital)	Ada
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)	Pernah 1 Kali direplikasi mandiri antar SKPD dengan daerah lain atau dokumen replikasi Bapperida	Ada
17	Kecepatan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Ada
18	Kemanfaatan Inovasi	Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih : satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb), satuan unit (OPD/UPTD/Desa/RT/RW/Kampung/KK/Organisasi, dsb), satuan biaya (Rupiah), satuan pendapatan (rupiah), satuan hasil produk/satuan penjualan	Jumlah Pengguna 501 Orang Keatas / Unit Diatas 50% / Efisiensi Belanja 20,01% - 30%	Ada
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Ada
20	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Memenuhi 5 unsur substansi	Ada
21	Sertifikat HKI	Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka Pengakuan atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk: Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang. Surat Pengajuan HKI terdiri dari 1. Surat Pernyataan 2. Surat Peralihan Hak Cipta 3. Surat Pendaftaran HKI 4. Pedoman Teknis Inovasi 5. SOP Inovasi 6. Proposal Inovasi 7. Berita Inovasi 8. KTP dan NPWP Pencipta dan Pemegang Hak Cipta		N/A
22	Peta Rencana Pengembangan Inovasi	Peta Rencana Pengembangan Inovasi adalah gambaran strategis yang menunjukkan arah tahapan, target dan langkah-langkah operasional inovasi yang ditetapkan selama periode 5 tahun		N/A